

I. PENDAHULUAN

Persiapan PNPM masih banyak mengambil porsi waktu konsultan di awal tahun 2007 ini. Penyempurnaan Penjelasan PTO dan perancangan struktur manajemen merupakan salah satu persiapan PNPM-PPK. Bank Dunia pun membuat rekomendasi konsep struktur sebagai perbaikan dari struktur yang ada saat ini. Penyelesaian kasus dan peng-himpunan data hasil-hasil kegiatan PPK juga merupakan bagian aktivitas bulan ini.

I.1. GAMBARAN UMUM

Agenda KM-Nasional yang terkait dengan persiapan PNPM pada Januari 2007 mencakup penyelesaian draf PTO beserta penjelasannya, penyusunan standar kompetensi konsultan, dan pembuatan media-media informasi. Pembuatan media informasi ini sangat penting dipersiapkan sebagai salah satu strategi kampanye PPK. Di samping itu, Situs Web PPK sedikit demi sedikit disempurnakan dan content-nya mulai terisi. Agenda lain yang tidak dapat dilepaskan dari PNPM adalah merumuskan rekomendasi dan tanggapan dari Aide-Memoire Bank Dunia per 13 Desember 2006 mengenai Manajemen dan Struktur PPK-PNPM. Selanjutnya tanggapan ini disampaikan kepada Satker Khusus Pembinaan PPK-PMD.

Setiap awal tahun, KM-Nasional menyusun rencana kerja (RKTL) tahunan maupun triwulan-an. Berhubung kontrak kerja saat ini hanya tiga bulan, maka RKTL yang disusun untuk sementara hanya tiga bulan. Fokus kegiatan (di luar persiapan PNPM) pada triwulan pertama tahun 2007 ini adalah penyelesaian kegiatan PPK seluruh siklus (kecuali Siklus X), penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir fase serta analisis pencapaian indikator kinerja berdasarkan Loan Agreement IBRD 4627/IDA 3535-IND dan IBRD 4710/3806-IND, dilaksanakannya tahap perencanaan kegiatan Siklus X, pemberian anugrah "Sikompak", dan evaluasi kinerja konsultan.

Berdasarkan Laporan Mingguan (LM), hingga 2 Januari 2007 telah berhasil dicairkan dana kegiatan Siklus VIII sebanyak 99% atau Rp450,77 miliar. Status ini merupakan nilai final karena pencairan dana tidak akan mencapai 100% akibat 3 kecamatan yang tidak melanjutkan kegiatan. Begitu pula dengan Siklus IX, tiga lokasi (di kab. Kep. Sula, Maluku Utara) tidak melanjutkan kegiatan karena dana cost sharing tidak dapat dicairkan, sehingga pencairan nasional tidak mencapai 100%. Dana yang dicairkan sebesar Rp435,03 miliar atau 99% dari Rp439,25 miliar.

Target penyelesaian kegiatan PPK II dan PPK IIIA tahun I (Siklus VII) pada Desember 2006 belum memberikan hasil yang memuaskan. Tercatat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan lokasi Siklus IV masih belum melaksanakan MDST. Sedangkan Siklus V masih menyisakan 50 desa di 17 kecamatan, Siklus VI masih terdapat 95 desa di 31 kecamatan belum melaksanakan MDST, dan Siklus VII menyisakan 32 desa di 23 kecamatan belum melakukan MDST juga.

Sementara itu, setiap fase kegiatan PPK tidak berakhir begitu saja. Namun keberhasilannya harus diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Adapun indikator kinerja PPK II telah tercantum dalam dokumen perjanjian pinjaman (Loan Agreement IBRD 4627/IDA 3535-IND). Penilaian keberhasilan terhadap pencapaian target ini telah dilakukan oleh KM-Nasional mengingat kegiatan PPK II segera berakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa target tercapai 89%. Jumlah kecamatan partisipasi yang jauh melebihi target mempengaruhi pencapaian indikator lainnya baik secara positif maupun negatif.

Tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan konsultan pada berbagai tingkatan selama periode Desember 2006 (di provinsi NAD, Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara) dikaji ulang dan dirumuskan rekomendasi mengenai tindakan yang harus diberikan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Selanjutnya rekomendasi ini dituangkan dalam Nota Dinas yang ditujukan kepada Satker Khusus PPK untuk dijadikan bahan pertimbangan rekrutmen PNPM-PPK.

I.2. KEGIATAN JANUARI 2007

Pada bulan Januari 2007, kegiatan KM-Nasional masih diwarnai oleh persiapan PNPM. Namun demikian kegiatan lainnya tetap dilakukan walaupun porsinya cukup kecil, yaitu menindaklanjuti pengaduan kasus penyimpangan dana di kab. Subang dan dimulainya program R2PN di Kep. Nias. Secara rinci, aktivitas tersebut diuraikan di bawah ini:

- a. KM-Nasional diundang pada Workshop dan Pelatihan Pratugas di prov. Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kep. Nias. Program ini sejatinya dapat dimulai pada Mei 2006 lalu dan ditargetkan pada tahun 2006 telah terbangun 500 unit rumah, 20 unit sekolah baik baru maupun rehab, 25 unit kantor desa, dan 25% prasarana umum telah terbangun. Namun karena berbagai kendala teknis, pelaksanaannya baru dapat dimulai pada awal tahun 2007.
- b. Kasus yang memiliki modus hampir sama dengan kasus di kec. Darandang (Purwakarta) muncul kembali dan terjadi di provinsi yang sama, yaitu Jawa Barat. Kelihaiian ketua UPK kec. Pusaka Nagara (Subang) dalam menutupi perbuatannya menyebabkan catatan pembukuan dan manipulasi rekening tidak terdeteksi oleh hasil audit. Bahkan audit yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia. Pada akhirnya pengaduan sampai ke KM-Nasional, bahwa ketua UPK telah menggelapkan dana sekitar Rp400 juta sejak tahun 2002 hingga 2006. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, KM-Nasional yang diwakili oleh unit pemeriksaan internal dan unit disbursement langsung ke lokasi dan selanjutnya diproses hingga sampai ke pihak kepolisian.



II. KEMAJUAN DAN HASIL

Kegiatan Siklus VIII dan IX yang baru saja menyelesaikan pencairan dana, pada Januari 2007 mulai menyelesaikan kegiatan fisik dan 604 lokasi telah melakukan MDST. Laporan perkembangan pinjaman menunjukkan tingkat pengembalian pinjaman UEP sebesar 85,15% dengan saldo pinjaman Rp419,15 miliar. Sedangkan, tingkat pengembalian pinjaman SPP sebesar 93,95% dengan saldo pinjaman sebesar Rp279,70 miliar.

II.1. STATUS PENCAIRAN DANA PER JANUARI 2007

Penelusuran backlog dan outstanding masih menjadi fokus penanganan tim keuangan dan anggaran. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI No. 01/PB/2005, laporan keuangan yang menggunakan anggaran negara harus dilaporkan melalui SAI. Namun pada pelaksanaannya masih ditemui kendala dalam entri data SP2D karena masih banyak dokumen SP2D yang kurang dan harus menunggu dokumen SP2D maupun SPM dari provinsi.

Unit keuangan dan anggaran juga mulai melakukan identifikasi jumlah desa dan kategori lokasi agar ancar-ancar alokasi DOK Perencanaan kegiatan PNPM-PPK dapat segera diketahui. Akan tetapi, hingga akhir Januari 2007 masih ada provinsi yang belum mengirimkan data yaitu: provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Papua, dan DI Yogyakarta. Akibat terfokusnya kegiatan pada pelaporan SAI, pemantauan pencairan dana yang secara rutin menjadi tugas tim keuangan dan anggaran relatif terlambat. Status pencairan dana PPK III pada Tabel 1. diperoleh dari Laporan Mingguan per 2 Januari 2007 (yang terakhir). Sedangkan pencairan dana PPK II tidak mengalami perubahan.

Tabel 1. Pencairan Dana BLM PPK II dan III Per Januari 2007

Keterangan	PPK II			PPK III/a		PPK III/b
	Siklus IV	Siklus V	Siklus VI	Siklus VII	Siklus VIII	Siklus IX
Jumlah Kecamatan	1.264	964	868	592	592	557
Alokasi Dana (miliar Rp)	1.051,000	790,725	685,500	470,250	453,500*	439,250**
Pencairan Dana (miliar Rp)	1.041,119	772,797	633,713	466,483	450,772	435,026
Persentase (%)	99,1	97,7	92,5	99,2	99,40	99,04

Ket: *) Alokasi awal Rp470,25 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan.

**) Alokasi awal Rp455,75 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan.

PENCAIRAN DANA PPK II

Seperti diuraikan sebelumnya, status pencairan dana PPK II tidak mengalami perubahan. Seyogyanya kegiatan PPK II telah berakhir, namun masih adanya beberapa desa yang



belum melaksanakan MDST menyebabkan penyelesaian dibatasi hingga akhir Februari 2007. Pencairan dana BLM PPK II secara detail ditampilkan Tabel 2.

Tabel 2. Pencairan Dana BLM PPK II per Januari 2007

DIPP	Jumlah Kec.	Alokasi DIPP (Rp)	Pencairan (Rp)	%
PPK II Th1 (2002/2003) FG	1.115	955.750.000.000	952.942.238.377	99,7%
MG	149	95.250.000.000	88.176.477.237	92,6%
Subtotal	1.264	1.051.000.000.000	1.041.118.715.614	99,1%
PPK II Th2 (2004) FG	824	700.050.000.000	699.221.836.523	99,9%
MG	140	90.675.000.000	73.575.000.000	81,4%
Subtotal	964	790.725.000.000	772.796.836.523	97,7%
PPK II Th3	724	594.250.000.000	562.088.123.887	94,6%
MG	144	91.250.000.000	71.625.000.000	78,5%
Subtotal	868	685.500.000.000	633.713.123.887	92,4%
TOTAL		2.527.225.000.000	2.447.828.676.024	96,9%

PENCAIRAN DANA PPK III

Status pencairan dana PPK III ditampilkan pada Tabel 3. Seluruh kegiatan PPK III (kecuali Siklus X) telah mencairkan dana hingga 100% walaupun pada Tabel terlihat belum 100%. Hal ini diakibatkan oleh adanya lokasi pending dan terkendala cost sharing. Sedangkan alokasi dana untuk wilayah terkena bencana telah dipisahkan dari tabel. Adapun perincian lokasi tersebut adalah:

- Siklus VII (592 kecamatan) berkurang satu kecamatan, yaitu Bokat (kab. Buol, Sulawesi Tengah).
- Siklus VIII (592 kecamatan) berkurang 26 kecamatan yang terdiri dari: DIY (15 kecamatan bencana), NTT (4 kecamatan dialihkan Siklus IX), Kalimantan Selatan (3 kecamatan di kab. Kotabaru mengundurkan diri), Sulawesi Tengah (1 kecamatan pending) dan Papua (3 kecamatan: Mappi, Asmat, Kota Jayapura tidak mendapat dana cost sharing).
- Siklus IX (557 kecamatan) berkurang 24 kecamatan yang terdiri dari: DIY (6 kecamatan), Jawa Tengah (5 kecamatan di kab. Klaten), NTT (9 kecamatan), dan Maluku Utara (3 kecamatan di kab. Kep. Sula) serta Lampung (1 kecamatan di kab. Lampung Barat) tidak mendapat alokasi dana cost sharing.
- Untuk Siklus X, baru akan dimulai pada Maret 2007. Namun dapat diperkirakan bahwa 11 kecamatan terkena bencana (DIY dan Klaten) tidak masuk dalam kegiatan Siklus X.

Tabel 3. Pencairan DIPA PPK III per Januari 2007

DIPA	JML KEC	ALOKASI DIPA (Rp)	Pencairan (Rp)	Prosen-tase
PPK III/a Siklus VII	592	354.025.000.000	351.884.997.891	99%
PPK III/ a Siklus VII (Cost Sharing)	592	116.225.000.000	114.597.897.230	99%
TOTAL	592	470.250.000.000	466.482.895.121	99%
PPK III/a Siklus VIII	573	342.325.000.000	341.199.999.369	99,67%
PPK III/a Siklus VIII (Cost Sharing)	573	111.175.000.000	109.572.273.174	98,56%
TOTAL	573	453.500.000.000	450.772.272.543	99,40%
PPK III/b Siklus IX	537	316.875.000.000	314.549.999.783	99,27%
PPK III/b Siklus IX (Cost Sharing)	537	122.375.000.000	120.475.999.492	98,45%
TOTAL	537	439.250.000.000	435.025.999.275	99,04%



II.2. PERKEMBANGAN KEGIATAN

Hingga Januari 2007, upaya penyelesaian kegiatan yang ditandai dengan MDST terus dilakukan baik PPK II maupun PPK III. Upaya ini memberikan hasil yang baik, walaupun cukup berat dalam mencapai target penyelesaian pada Februari mendatang. Sebanyak 264 kecamatan (46%) Siklus VIII telah menyelesaikan MDST per 2 Januari 2007. Sementara itu, pada Siklus IX telah dilaksanakan MDST di 304 kecamatan (57% dari jumlah lokasi). Hingga akhir Januari 2007, jumlah lokasi yang telah MDST pada masing-masing Siklus ialah 300 dan 304 kecamatan. Berikut uraian perkembangan kegiatan setiap siklus:

SIKLUS IV

Siklus IV sebagai kegiatan yang paling awal dilaksanakan diantara siklus kegiatan yang masih aktif saat ini, masih menyisakan lokasi yang belum MDST. KM-Nasional terus berupaya untuk mendorong penyelesaian dan cukup membuahkan hasil dimana saat ini tinggal 5 kecamatan yang belum menuntaskan MDST. Dari kelima lokasi tersebut, 4 diantaranya di provinsi Papua dan Irian Jaya yang dipandang cukup sulit diselesaikan. Sedangkan satu lokasi lainnya di provinsi Kalimantan Tengah sedang diupayakan penyelesaiannya. Tabel 4. menunjukkan keterangan detail setiap lokasi yang belum MDST maupun pending.

Tabel 4. Kecamatan Siklus IV Belum MDST

PROVINSI	Jml Kec.	Keterangan
N. ACEH DARUSSALAM	18	2 kec. pending: kec. Indrapuri, kab. Aceh Besar, kec. P. Banyak, kab. Aceh Singkil; 16 kec. bencana
RIAU	1	Pending: kec. Tapungkiri, kab. Kampar
JAWA TIMUR	1	Pending: kec. Udanawu, kab. Blitar
KALIMANTAN TENGAH	1	Belum MDST: tidak dapat mencairkan dana tahap III
SULAWESI SELATAN	1	Pending: kec. Mambie, kab. Polewali Mamasa
PAPUA	4	3 kec. pending: kec. Agisiga, Haju, Assue; 1 kec belum MDST: Waropen Atas, kab. Waropen
IRIAN JAYA BARAT	11	8 kec. pending: kec. Beraur, Moraid, Sausapor, Seget, Samate, Waigeo Selatan, Waigeo Utara, Buruway; 3 kec. belum MDST: Ransiki, Warmare, Aranday
Total	37	16 kec. pending, 5 kec. belum MDST, 16 kec. bencana

SIKLUS V

Perkembangan kegiatan Siklus V pada Januari 2007 cukup signifikan dengan berhasilnya beberapa lokasi menyelesaikan MDST. Dari 19 kecamatan pada Desember 2006, saat ini tersisa 13 kecamatan yang belum MDST dan 6 kecamatan diantaranya di provinsi Sulawesi Tenggara. Keenam lokasi tersebut merupakan lokasi Matching Grant yang terlambat mendapat kucuran dana karena berbagai kendala teknis. Namun komitmen pemerintah daerah cukup tinggi sehingga akhirnya seluruh dana dapat tercairkan. Menyikapi kondisi demikian KM-Nasional telah memberikan memorandum penyelesaian kegiatan dan siap memberikan bantuan jika pelaku di lapangan tidak dapat menyelesaikannya. Ditargetkan pada akhir Februari 2007 seluruh lokasi PPK II dapat menyelesaikan MDST di seluruh desa terdantai. Rincian lokasi belum melakukan MDST di setiap provinsi ditampilkan Tabel 5.



Tabel 5. Kecamatan Belum MDST-Siklus V

PROVINSI	Jml Kec.	Keterangan
N. ACEH DARUSSALAM	82	Revisi Pola: PPK Rehabilitasi
SUMATERA UTARA	9	6 kec. di Kep. Nias revisi Pola : PPK Rehabilitasi, 3 kec. Belum MDST: kec. Muara Batang Gadis, Sorkam, dan Kolang
JAWA TIMUR	1	Pending: Gandusari, kab. Blitar
NUSA TENGGARA TIMUR	2	Pending: Pala dan Wewewa Selatan, kab. Sumba Barat
KALIMANTAN TENGAH	1	Belum MDST: kec. Kamipang
GORONTALO	1	Belum MDST: kec. Wonosari
SULAWESI SELATAN	3	Pending: Seko dan Rampi, kab. Luwu Utara; Mambie, kab. Polewali Mamasa
SULAWESI TENGGARA	6	Belum MDST (per Jan 2007 sudah cair 100%): kec. Uluiwoi, Samaturu, Wawonii, Soropia, Tomia, dan Wangi-wangi
MALUKU UTARA	1	Pending: Sahu, kab. Halmahera Barat
MALUKU	2	Belum MDST
Total	88 kec.	PPK Rehab, 7 kec. pending, 13 kec. belum MDST

SIKLUS VI

Lokasi PPK Siklus VI sebanyak 868 kecamatan, akan tetapi tidak seluruhnya berjalan hingga MDST. Alhasil, lokasi yang tersisa adalah 680 kecamatan. Adapun kondisi 188 kecamatan lainnya diuraikan sebagai berikut:

- a. 86 kecamatan di NAD dan 4 kecamatan di Kep. Nias - Sumatera Utara melaksanakan PPK Pola Khusus (Rehabilitasi) dengan menggunakan dana MDTF.
- b. 52 kecamatan di Papua dan 26 kecamatan di Irian Jaya Barat melaksanakan PPK Pola khusus, yaitu PPD.
- c. 20 kecamatan pending karena berbagai alasan di antaranya: dana MG tidak tersedia dalam APBD, termasuk kecamatan bermasalah, ataupun kerusakan akibat pemekaran kecamatan.

Lokasi belum MDST Siklus VI pada bulan lalu berjumlah 40 kecamatan, pada bulan ini menampakkan perkembangan sehingga tersisa 29 kecamatan (lihat Tabel 6.) yang belum MDST. Provinsi Sumatera Utara memiliki lokasi terbanyak belum MDST (11 kecamatan). Namun berdasarkan laporan bulanan (hardcopy) dari provinsi tersebut, kecamatan yang belum menuntaskan MDST sebanyak 6 kecamatan. Hal ini dimungkinkan karena terjadi kesalahan pada SIP di provinsi tersebut. Jadi jumlah kecamatan yang belum MDST adalah 24 kecamatan (jumlah lokasi setiap provinsi terinci dalam lampiran).

Sementara itu, dari 10 kecamatan di provinsi Sulawesi Tenggara yang belum tuntas melakukan pencairan, 5 kecamatan diantaranya telah 100% cair dan 1 kecamatan telah menyelesaikan MDST di seluruh desa. Artinya tersisa 9 kecamatan belum MDST dengan 5 kecamatan belum cair 100%. Kondisi ini hampir sama dengan lokasi di Siklus V, dimana pemerintah daerah terlambat dalam mencairkan dana Matching Grant.



Tabel 6. Kecamatan Siklus VI Belum MDST

PROVINSI	JML KEC.	KETERANGAN
N. ACEH DARUSSALAM	86	Revisi: PPK Rehabilitasi
SUMATERA UTARA	15	Revisi: 4 kec. PPK Rehabilitasi di Kep. Nias, 11 kec belum MDST
RIAU	2	2 kec. Pending
SUMATERA SELATAN	1	Belum MDST
BANTEN	3	3 kec. Pending
JAWA TENGAH	2	Pending
JAWA TIMUR	4	
NUSA TENGGARA TIMUR	5	2 kec. Pending, 3 kec. Belum MDST
KALIMANTAN TIMUR	1	Belum MDST
GORONTALO	2	1 kec belum cair sama sekali
SULAWESI UTARA	4	Belum MDST
SULAWESI TENGAH	1	1 kec. Pending
SULAWESI SELATAN	5	2 kec. Pending, 3 kec. Belum MDST
SULAWESI TENGGARA	9	Belum MDST: 2 kec. belum cair sama sekali, 1 kec. cair 40%, 2 kec. cair 80%, 4 kec. cair 100%
SULAWESI BARAT	1	Pending
MALUKU UTARA	3	3 kec. Matching Grant: Tidak Terdanai APBD
PAPUA	52	78 kec. PPK Pola Khusus (PPD)
IRIAN JAYA BARAT	26	
Total Belum MDST	29	Belum MDST : 24 kec.; 5 kec. belum cair 100%
Total Pending	20	Tersebar di 9 provinsi
Total PPK Pola Khusus	168	Tersebar di 4 provinsi

REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK II

Sejumlah kegiatan telah berhasil dirangkum berdasarkan laporan SPC dari seluruh provinsi. Keterbatasan sistem informasi basis data yang ada menyebabkan data Surat Penetapan Camat (SPC) dipandang sebagai data yang paling akurat sehingga masih digunakan untuk melihat rekapitulasi kegiatan dan jumlah dana yang terserap masyarakat. Adapun data laporan akhir pada SIP yang menunjukkan kegiatan yang telah diselesaikan sedang disiapkan dan ditampilkan pada Laporan Tahunan.

Hingga akhir Januari 2007, rekapitulasi kegiatan tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Sehingga uraian yang disampaikan relatif tidak berubah. Tabel 7. menunjukkan rekapitulasi kegiatan PPK II yang telah diselesaikan berikut alokasi dana pada setiap siklus. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kegiatan mencapai 56.635 kegiatan. Artinya telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, jika ditinjau dari dana yang terserap, kegiatan prasarana sarana (P/S) mengambil proporsi terbesar yaitu 74%. Sedangkan dari sisi banyaknya usulan kegiatan yang didanai, prosentase kegiatan P/S masih tertinggi, yaitu 46% dari total kegiatan dengan angka 25.938 kegiatan.

Tabel 7. Kegiatan & Alokasi Dana PPK II

Jenis Kegiatan	Siklus IV		Siklus V		Siklus VI		Total JK	% Total JK	Total Rp (miliar)	% Total Rp
	JK	Rp (miliar)	JK	Rp (miliar)	JK	Rp (miliar)				
Prasarana/ Sarana	12.020	774,78	8.038	530,206	5,880	381.895	25,938	46%	1,686.881	74%
UEP	3.650	101,67	1.789	60,658	1,317	44.734	6,756	12%	207.062	9%
Pendidikan	1.780	59,95	1.359	57,653	1,411	63.644	4,550	8%	181.247	8%
Kesehatan	794	20,75	490	16,780	390	16.279	1,674	3%	53.809	2%
SPP	8.039	65,34	5.346	46,414	4,332	37.543	17,717	31%	149.297	7%
Total	26.283	1.022,49	17.022	711,713	13,330	544.095	56,635	100%	2,278.298	100%

Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.



Kegiatan P/S yang mengambil porsi terbesar baik dari sisi jumlah kegiatan maupun besarnya dana yang digunakan, terdiri dari beberapa item kegiatan yang lebih spesifik dan diklasifikasikan dalam 9 jenis kegiatan (Tabel 8).

Kegiatan yang dominan dipilih masyarakat adalah pembangunan jalan, baik rehab maupun pembukaan jalan baru. Pembangunan ini dipandang penting karena dapat membuka akses (berbagai bidang) bagi masyarakat setempat ke lokasi lain di sekitarnya. Pilihan kedua jatuh pada pengadaan sarana air bersih. Sulitnya memperoleh air bersih mendorong masyarakat untuk meng-usulkan kegiatan pengadaan air bersih melalui pipa-pipa, kran, dan bak penampung air.

Tabel 8. Kegiatan P/S pada PPK II

Jenis Kegiatan	Jumlah (unit)	Porsi (%)	Panjang (m)
Jalan	5,973	23.03%	6.381.325
Rehab/Perkerasan	7,932	30.58%	10,236,812
Jalan Setapak	417	1.61%	237,205
Jembatan	1,726	6.65%	102,483
Rehab Jembatan	359	1.38%	10,393
Air Bersih	3,087	11.90%	
Irigasi	2,405	9.27%	
MCK	1,138	4.39%	
Pasar	52	0.20%	
Rehab Pasar	8	0.03%	
Listrik/Genset	54	0.21%	
Lain-Lain	2.787	10.74%	
Total	25.938	100.00%	16.968.217

Tabel 9. Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan pada PPK II

UEP		PENDIDIKAN		KESEHATAN	
KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK
UEP-	3,361	Bangun Gedung Sekolah	985	Bangun Gedung Kesehatan	216
Peternakan	130	Rehab Gedung Sekolah	1.071	Rehab Gedung Kesehatan	48
Perikanan	54	Bea Siswa	1.158	Pos Yandu	913
Perkebunan	10	Lain-Lain	1.336	Lain-Lain	497
Pertanian	76				
Industri Kecil	53				
Dagang	270				
Lain-Lain	2802	Total Pendidikan	4.550	Total Kesehatan	1.674
Total UEP	6.756	Total SPP	17.717		

Sementara itu, kegiatan non-P/S mengambil porsi 54% yang tersebar di tiga jenis kegiatan yaitu: ekonomi yang terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus untuk Perempuan (SPP), pendidikan, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga pada PPK III proporsi dana untuk kegiatan ini ditingkatkan maksimum 25% dari dana BLM. Namun demikian, penambahan dana tidak diberikan begitu saja. Akan tetapi disyaratkan tingkat pengembalian UEP/SPP rata-rata minimal 80%. Rincian kegiatan non-P/S ditunjukkan Tabel 9.

SIKLUS VII

Penyelesaian kegiatan TA 2005 untuk PPK III (Siklus VII) ditargetkan pada Desember 2006 dan telah disepakati dalam Rakornas Oktober 2006. Namun target tersebut belum dapat dicapai dengan baik karena hingga akhir Januari 2007, MDST belum dapat dituntaskan di seluruh lokasi. Adapun jumlah lokasi pada awalnya sebanyak 592 kecamatan di 23 provinsi, akan tetapi menjadi 579 kecamatan karena kecamatan Bokot,



kab.Buol (Sulawesi Tengah) tidak dapat melanjutkan kegiatan. Sedangkan 12 kecamatan di Papua dan Irijaabur dipantau secara khusus.

Dari 579 kecamatan, sebanyak 565 kecamatan (98%) telah menyelesaikan MDST. Sementara itu sisanya 14 kecamatan belum MDST 100% yang tersebar di Sumatera Utara (4 kecamatan), DIY (5 kecamatan) dan NTT (5 kecamatan). Di Provinsi Sumatera Utara dan DIY, konsentrasi kegiatan terbagi pada pelaksanaan PPK Rehabilitasi-Rekonstruksi sehingga penyelesaian relatif terlambat. Bahkan pelaksanaan program R2PN mulai diaktifkan pada Januari 2007. Sementara itu, provinsi NTT mengelola 77 kecamatan merupakan lokasi terbanyak dari seluruh provinsi. Jadi pelaksanaan kegiatan di NTT memerlukan energi dan waktu yang lebih banyak, akan tetapi keterlambatan ini tidaklah terlalu buruk karena 5 kecamatan yang belum menyelesaikan MDST adalah hanya 6% dari seluruh lokasi di provinsi tersebut.

SIKLUS VIII

Telah dijelaskan pada laporan sebelumnya, bahwa dari 592 kecamatan, data yang disampaikan pada lampiran diluar DIY, Papua, dan Irijaabur serta lokasi pending. Akibatnya pantauan lokasi PPK (Siklus VIII) tersisa 561 kecamatan. Pada Januari 2007, Kegiatan PPK IIIA yang menggunakan dana TA 2006 ini berfokus pada pelaksanaan MDST karena seluruh lokasi telah berhasil mencairkan dana pada akhir Desember 2006. Berdasarkan Laporan Mingguan (LM), hingga 2 Januari 2007 telah berhasil dicairkan dana kegiatan Siklus VIII sebanyak 99% atau Rp450,77 miliar. Status ini merupakan nilai final karena pencairan dana tidak akan mencapai 100% akibat 3 kecamatan yang tidak melanjutkan kegiatan.

Adapun kegiatan MDST selama satu bulan dapat terselesaikan di 300 kecamatan (lihat lampiran). Artinya masih tersisa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada Februari 2007 sebanyak 261 kecamatan atas sebesar 46% dari total lokasi.

REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK III/A

Pada Januari 2007, jumlah kegiatan selama satu bulan terakhir meningkat tajam. Tidak kurang dari 2000 kegiatan terinventarisir dalam satu bulan dengan serapan dana sebesar Rp864,39 miliar. Proporsi kegiatan dan alokasi dana masih didominasi oleh kegiatan prasarana-sarana. Hampir 50% usulan terdandi diisi oleh kegiatan tersebut, sisanya terbagi menjadi tiga jenis kegiatan. Tabel 10. menunjukkan jumlah kegiatan dan dana yang terserap pada PPK III/a. Untuk kegiatan UEP tidak ada sama sekali, karena telah dihapuskan mengingat tingkat pengembalian pinjaman dana UEP selama ini sangat kecil.

Tabel 10. Kegiatan & Alokasi Dana PPK III/a

Jenis Kegiatan	Siklus VII		Siklus VIII		Total JK	% Jumlah Kegiatan	Total Rp (miliar)	% Rp
	Jumlah Kegiatan	Rp (miliar)	Jumlah Kegiatan	Rp (miliar)				
Prasarana/Sarana	5.092	328,78	5.368	313,04	10.460	49%	641,82	74%
UEP	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Pendidikan	800	45,31	867	51,36	1.667	8%	96,67	11%
Kesehatan	389	17,43	387	17,90	776	4%	35,33	4%
SPP	4.431	41,22	4.018	49,35	8.449	39%	90,57	11%
Total	10.712	432,73	10.640	431,66	21.352	100%	864,39	100%

Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.



Setiap jenis kegiatan yang ditampilkan pada Tabel 10. masih dirinci dalam beberapa item kegiatan. Namun dalam perincian ini masih ditemui kelemahan, yaitu dalam menguraikan item lain-lain. Pada masa yang akan datang perlu dipersiapkan SIP yang dapat mengakomodir semua informasi yang diperlukan.

Untuk kegiatan pembangunan P/S, terbagi menjadi 12 item yang didominasi oleh perkerasan dan pembangunan jalan (Tabel 11.). Kegiatan lain-lain menempati posisi kedua karena cukup banyaknya kegiatan P/S yang tidak tercantum dalam daftar. Misalnya: gorong-gorong, talud, dsb. Sementara itu, lebih dari 5 kilo-meter jalan dan jembatan berhasil dibangun dengan menggunakan dana PPK dan swadaya masyarakat.

Tabel 11. Kegiatan Infrastruktur pada PPK III/a

Jenis Kegiatan	Jumlah (unit)	Porsi (%)	Panjang (m)
Jalan	1.922	18,37	2.290.990
Rehab/Perkerasan	3.099	29,63	3.180.276
Jalan Setapak	222	2,12	132.987
Jembatan	623	5,96	15.193
Rehab Jembatan	135	1,29	2.848
Air Bersih	857	8,19	
Irigasi	874	8,36	
MCK	335	3,20	
Pasar	82	0,78	
Rehab Pasar	16	0,15	
Listrik/Genset	84	0,80	
Lain-Lain	2.211	21,14	
Subtotal	10.460		5.069.111

Tabel 12. Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan pada PPK III/a

SPP		PENDIDIKAN		KESEHATAN	
KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK	KEGIATAN	JK
		Bangun Gedung Sekolah	967	Bangun Gedung Kesehatan	42
		Rehab Gedung Sekolah	342	Rehab Gedung Kesehatan	16
		Bea Siswa	17	Pos Yandu	439
		Lain-Lain	370	Lain-Lain	279
Total SPP	8.449	Total Pendidikan	1.667	Total Kesehatan	776

Selain kegiatan P/S, kegiatan yang dapat dirinci adalah kegiatan Pendidikan dan Kesehatan (Tabel 12.) yang jika ditelaah masih terkait dengan pembangunan P/S, seperti: pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, posyandu, ataupun polindes.

SIKLUS IX dan X

Pemantauan kegiatan Siklus IX melalui Laporan Mingguan (LM) berhenti sampai awal Januari 2007 atau hingga pencairan dana mencapai 100%. Namun akibat tiga lokasi (di kab. Kep. Sula, Maluku Utara) tidak melanjutkan kegiatan karena dana cost sharing tidak dapat dicairkan, pencairan nasional tidak mencapai 100%. Dana yang berhasil dicairkan sebesar Rp435,03 miliar atau 99% dari Rp439,25 miliar.

Tahap selanjutnya, jika dana telah terserap dan pekerjaan fisik telah mencapai 100%, maka masyarakat desa harus melaksanakan musyawarah desa serah terima. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa dari 557 kecamatan Siklus IX, karena kendala bencana berkurang menjadi 533 kecamatan termasuk provinsi Papua dan Irijaab. Pada lampiran, perkembangan kegiatan kedua provinsi tersebut disajikan terpisah. Alhasil banyaknya lokasi yang tercantum dalam lampiran adalah 491 kecamatan. Dari jumlah tersebut 304 kecamatan (62%) telah melaksanakan MDST.



Sebagai rangkaian kegiatan PPK III/b, tahap perencanaan Siklus X mulai dilakukan di 15 provinsi lokasi PPK. tahapan tercepat adalah Verifikasi Usulan Kegiatan di provinsi Sumatera Barat. Sementara provinsi lainnya rata-rata mencapai tahapan Penulisan Usulann (lihat lampiran). Belum dimulainya kegiatan siklus ini diakibatkan oleh masih terfokusnya pelaku PPK pada penyelesaian Siklus VIII dan IX. Di samping itu, masih banyaknya pertanyaan mengenai DIPA yang akan digunakan.

PPD DI PAPUA & IRJABAR

Kegiatan PPD di provinsi Papua dan Irjabar dilaporkan secara terpisah, begitu pula dengan lampiran perkembangannya. Kegiatan yang dapat dilaporkan adalah kegiatan Siklus VI - IX. Kegiatan Siklus IV tidak dilaporkan lagi. Namun demikian pada uraian sub-bab Siklus IV telah dijelaskan bahwa di kedua provinsi tersebut masih ada 4 kecamatan yang belum menuntaskan MDST.

Provinsi Papua

Dari 52 lokasi yang berpartisipasi pada kegiatan PPD Siklus VI, sebanyak 47 distrik yang meneruskan kegiatan hingga selesai. Pada akhir Januari 2007, 47 distrik tersebut telah melakukan Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) dan terbentuk 24 tim pemelihara di lokasi tersebut.

Sementara itu, dari 6 distrik yang mengikuti kegiatan PPK III/a, Siklus VII diikuti 4 distrik dan 3 distrik di Siklus VIII akibat distrik lainnya terkendala dana cost sharing. Berdasarkan Laporan Mingguan, hingga Januari 2007 dana telah berhasil dicairkan. Sedangkan MKST telah dilakukan di 3 distrik Siklus VII dan Siklus VIII belum sama sekali melakukan MKST. Begitu pula dengan 35 distrik PPK III/b (Siklus IX), seluruh lokasi tersebut mendapat dana cost sharing dan dana telah berhasil dicairkan. Namun pencairan dana yang cukup cepat tidak didukung oleh kesiapan masyarakat dalam melakukan tahap pelaksanaan kegiatan. Akibatnya selama satu bulan ini belum satupun lokasi yang berhasil melakukan MKST.

Provinsi Irian Jaya Barat (IJB)

Sama halnya dengan provinsi Papua, lokasi PPK di provinsi Irjabar tidak seluruhnya dapat melanjutkan kegiatan. Dari 26 distrik, hanya 16 distrik yang melaksanakan kegiatan PPK dan 15 distrik telah menyelesaikan MKST. Sedangkan menurut data yang diterima MIS, tim pemelihara belum terbentuk satupun di seluruh distrik.

Proses pelaksanaan di IJB relatif lebih lancar dan komitmen pemda terhadap dana cost sharing ditepati sehingga seluruh distrik (lokasi Siklus VIII dan IX) dapat melanjutkan kegiatan dan dana tercairkan hingga 100%. Namun kendala yang hampir sama dengan provinsi Papua dialami disini sehingga belum satu distrikpun yang berhasil melakukan MKST 100%. Sedangkan 3 dari 7 distrik Siklus IX telah berhasil melakukan MKST. Untuk Siklus VII, 2 dari 6 distrik tidak dapat melanjutkan kegiatan karena tidak mendapat dana cost sharing. Keempat distrik tersebut telah melakukan MKST di seluruh kampung terdantai.

PROYEK PERCONTOHAN

Sejak Oktober 2006, seluruh dana Pilot Pendidikan (Rp9,5 miliar) telah terserap. Begitu juga dengan pelaksanaan MDST, dari 186 desa, hanya satu desa di kec. Tinambung (Polewali, Sulawesi Barat) yang belum melakukannya. Direncanakan bahwa MDST akan dilakukan bersamaan dengan MDST kegiatan PPK Reguler Siklus VIII pada Februari 2007.



Di samping pilot pendidikan, kegiatan proyek percontohan PPK meliputi pilot kesehatan. Akan tetapi kegiatan ini telah berakhir pada Desember 2006 dan MDST telah dilakukan di seluruh desa disertai dengan terbentuk dan terlatihnya tim pemelihara agar kegiatan kesehatan terutama sarana air bersih tetap terjaga.

Pilot Pendidikan

Kegiatan pilot pendidikan hampir tuntas, dana BLM sebesar Rp9,5 miliar pun telah terserap. Di samping dana BLM, ada dana block grant yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pelaku pendidikan. Hingga Januari 2007, empat dari tujuh kabupaten telah mencairkan dana tahap III. Sisanya (kab.Minahasa Selatan di prov. Sulawesi Utara, kab. Polewali di prov. Sulawesi Barat, dan kab. Barito Kuala di prov. Kalimantan Selatan) baru mencairkan dana tahap II karena kesibukan para pelaku pendidikan.

Hasil-hasil kegiatan terbagi menjadi fisik dan non-fisik. Pembangunan/rehabilitasi prasarana/sarana (fisik) mendominasi kegiatan kegiatan Pilot Pendidikan. Dari 335 kegiatan yang terdanai, 140 kegiatan diantaranya (39,44%) merupakan kegiatan fisik dengan menyerap dana sebesar Rp5,2 miliar atau 55% dari total dana. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengingat sebagian besar prasarana/sarana pendidikan di lokasi pilot dalam kondisi tidak layak (sekolah yang rusak dan sarana pendidikan lain yang masih belum memadai).

Sementara itu, kegiatan non-fisik didominasi oleh pengadaan meubelair. Sebanyak 78 usulan pengadaan meubelair menyerap dana Rp1,98 miliar (20,8%) dari total dana. Pengadaan meubelair di sejumlah lokasi pilot memang sangat mendesak mengingat kondisi meja dan bangku belajar sangat memprihatinkan (tidak kokoh/reot, lapuk atau tidak utuh). Di sisi lain, mengingat banyaknya siswa "tidak mampu" mendorong adanya usulan beasiswa dengan kisaran Rp105 - Rp600 ribu per anak. Hasil-hasil kegiatan ini secara rinci diuraikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil-hasil Kegiatan Pilot Pendidikan

No	Kegiatan	Lokasi				Total	Serapan (Juta Rp)	%
		Kalsel	Sulut	Sulsei	Sulbar			
1.	Rehab sekolah/ ruang adm	28	18	9	11	66	2.979,5	31,36
2.	Meubelair	20	12	25	21	78	1.981,7	20,86
3.	Pembangunan sekolah, RKB, peninggian halaman, pagar	38	6	1	4	49	1.726,7	18,18
4.	Beasiswa	8	8	1	13	30	889,3	9,36
5.	Honor guru	16	4	2	18	40	681,1	7,17
6.	Fasilitas belajar dan peralatan	12	0	8	4	24	276,1	2,91
7.	Buku Paket	2	1	10	2	15	260,4	2,74
8.	Pembangunan Perpustakaan	4	2	0	0	6	206,4	2,17
9.	Seragam dan kostum	0	0	5	1	6	154,9	1,63
10.	WC/air bersih	6	0	4	2	12	176,6	1,86
11.	Rehap perpustakaan	0	1	1	0	2	48,4	0,51
12.	Jalan/titian	5	0	0	0	5	95,4	1
13.	Ketrampilan jahit	0	0	0	1	1	20,3	0,21
14.	PMTAS	1	0	0	0	1	3,2	0,03
	Total	140	52	66	77	335	9.500,0	100



Seiring dengan tuntasnya kegiatan yang didanai BLM, kegiatan yang didanai block grant pun hampir 100 persen selesai. Kegiatan ini dinamakan Intervensi Tim Teknis Pendidikan (TTPn). Lima dari tujuh kabupaten telah menyelesaikan semua kegiatan Intervensi TTPn termasuk kab. Barito Kuala walaupun dana block grant tahap III belum dicairkan. Sedangkan kab. Polewali Mandar masih menyisakan tiga kegiatan, yakni: MKS, penyaluran subsidi media belajar, dan studi banding. Sementara Minahasa Selatan belum melakukan studi banding. Keterlambatan ini disebabkan kesibukan TTPn dan anggota lainnya masih tergantung pada Koordinator TTPn.

PERKEMBANGAN UPK

Perkembangan UPK dipantau oleh Unit Keuangan dan Mikrokredit dan dibantu oleh Pendamping UPK (PUPK) yang berkedudukan di provinsi. Aspek yang dipantau diantaranya laporan perkembangan pinjaman, kolektibilitas, pelatihan UPK, dan pemetaan UPK. Pada Januari 2007, unit ini juga dilibatkan dalam penyusunan PTO PNPM-PPK dalam hal kegiatan ekonomi.

Di samping mendampingi UPK, PUPK bertugas melakukan pemetaan UPK, memberikan penilaian (scoring) terhadap perkembangan UPK dan pertumbuhan kelompok UEP/SPP. Adapun hal-hal yang dinilai adalah: tingkat pengembalian pinjaman, rasio kolektibilitas pinjaman, rasio tunggakan dibanding saldo pinjaman, laporan keuangan, administrasi-pembukuan, pengelolaan dokumen/arsip kegiatan, AD/ART, penguatan jenis kelompok, pengembangan jaringan dan RKTLL serta feedback pendampingan. Sedangkan pertumbuhan UEP/SPP dinilai dari: ikatan pemersatu kelompok, kegiatan anggota, kepengurusan kelompok, aturan kelompok, iuran anggota, dan administrasi kelompok. Sehingga kelompok-kelompok tersebut akhirnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok matang/siap. Sistem penilaian ini baru dirancang dan direncanakan akan diluncurkan ke lapangan pada Februari 2007.

Perkembangan pinjaman dan kolektibilitas UEP dan SPP

Laporan perkembangan pinjaman menjelaskan perkembangan pinjaman yang menyangkut realisasi pengembalian dibandingkan dengan target pengembalian pinjaman. Berdasarkan laporan perkembangan yang disusun setiap triwulan, laporan perkembangan pinjaman SPP dan UEP Nasional untuk periode Desember 2006 menunjukkan prosentase pengembalian pinjaman UEP sebesar 85,15% dengan saldo pinjaman Rp419,15 miliar. Sementara itu, tingkat pengembalian pinjaman SPP sebesar 93,95% dengan saldo pinjaman sebesar Rp279,70 miliar.

Laporan kolektibilitas pinjaman adalah laporan yang menjelaskan kualitas pinjaman yang didasarkan pada lamanya tunggakan dan juga memberikan informasi tingkat resiko pinjaman. Berdasarkan laporan kolektibilitas pinjaman Nasional per Desember 2006, dapat diketahui kondisi pinjaman SPP untuk kolektibilitas V (menunggak lebih dari 6 bulan) sebesar Rp17,28 miliar dari saldo pinjaman yang dilaporkan Rp259,13 miliar (6,67%). Adapun, kolektibilitas V pinjaman UEP sebesar Rp131,72 miliar (31,73%) dari saldo pinjaman dilaporkan Rp415,10 miliar.

Perkembangan pemetaan UPK

Hasil pemetaan UPK dari Desember 2004 - Desember 2006 ditunjukkan Tabel 14. Sedangkan laporan pemetaan per Desember 2006 menghasilkan jumlah UPK dengan kondisi seperti disampaikan pada tabel di atas. Jika dikategorikan menjadi empat kategori, maka hasilnya digambarkan pada Tabel 15.



Tabel 14. Hasil Pemetaan UPK

No.	Waktu Pemetaan	Jumlah UPK yang Dipetakan	Jumlah UPK Potensial	Jumlah UPK Non-Potensial	Keterangan
1	Desember 2004	640	327	313	
2	Desember 2005	1.364	987	359	28 UPK non potensial pada tahun sebelumnya, menjadi potensial
3	September 2006	1.542	1.170	372	102 UPK non potensial pada tahun sebelumnya, menjadi potensial
4	Desember 2006	1.564	1.189	375	

Tabel 15. Kategori UPK Berdasarkan Pemetaan per Desember 2006

Pemetaan	Kategori	Jumlah UPK	Keterangan	
			Nilai Pemetaan	Saldo Pinjaman di Masyarakat
Potensial: 1.189	A	805	>6	>Rp300 juta
	B	384	>6	≤Rp300 juta
Non-Potensial: 375	C	230	≤6	>Rp300 juta
	D	145	≤6	≤Rp300 juta

Dari 30 provinsi, 22 provinsi mengirimkan laporan pemetaan UPK terbaru. Sedangkan 8 provinsi (NAD, Kepri, Jabar, DIY, Jatim-terlambat, Gorontalo-terlambat, Papua dan Irbabar) belum mengirimkan data terbaru.

Permasalahan dan Rekomendasi

Dalam menjalankan aktivitas unit, ditemui beberapa permasalahan, yaitu:

1. Pada pembahasan PTO PNPM-PPK kegiatan ekonomi dan penjelasan PTO PNPM PPK dengan tim sekretariat PPK lebih banyak membahas metode penyajian dan bahasa daripada isi materi.
2. Hingga Januari 2007, data SIP belum dapat mendukung untuk laporan keuangan. Sehingga rekapitulasi laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas pinjaman dilakukan secara manual.
3. Beberapa provinsi melaporkan data kolektibilitas pinjaman yang tidak sesuai dengan laporan perkembangan pinjaman. Jumlah sisa angsuran yang dalam kolektibilitas tidak sama dengan saldo pinjaman yang ada dalam masyarakat. Padahal seharusnya jumlah keduanya sama.
4. Tidak semua provinsi mengirimkan laporan pemetaan UPK dan updating per triwulan, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam merekap pemetaan UPK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, direkomendasikan penyelesaian sebagai berikut :

1. Dalam membahas PTO diharapkan masukan/usulan berupa materi yang diperlukan, sehingga kegiatan PNPM dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Diharapkan unit MIS dapat menyediakan SIP yang mendukung data keuangan untuk mempermudah proses pelaporan dan analisis kondisi lapangan.
3. KM-Nasional akan memberikan umpan balik mengenai hasil pelaporan provinsi agar dapat mengirimkan data yang akurat dan umpan balik untuk provinsi yang tidak melakukan pemetaan UPK.



III. PARTISIPASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Penyusunan comprehensive training plan dan kerangka acuan pelatihan tahun 2007 masih menjadi agenda unit training, termasuk penyusunan standar kompetensi konsultan kabupaten maupun fasilitator kecamatan. Panduan supervisi pun telah dipersiapkan untuk memantau pelaksanaan pengintegrasian PPK ke dalam pembangunan daerah.

Terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas, Unit Training telah menyusun Training Plan dan Kerangka Acuan Pelatihan tahun 2007 yang akan digunakan sebagai media informasi tentang tujuan dan proses kegiatan yang akan dilakukan serta pola penyelenggaraannya. Di samping itu, penyusunan standar kompetensi untuk Konsultan Kabupaten dan fasilitator kecamatan tetap disempurnakan.

Workshop pengintegrasian PPK yang telah dilaksanakan pada November - Desember 2006 lalu, perlu dipantau penerapannya. Untuk itu, disusun panduan supervisi pelaksanaan pengintegrasian PPK ke dalam pembangunan daerah. Direncanakan, panduan ini akan diberikan kepada personil KM-Nasional yang melakukan kunjungan lapangan sehingga evaluasi dapat dilakukan secara bersamaan dengan tujuan kunjungan yang lain. Adapun kegiatan capacity buiding dilaporkan setiap tiga bulan, dalam hal ini Desember 2006 - Februari 2007, sehingga akan dilaporkan pada Februari mendatang.

Pelaksanaan workshop dan pelatihan pratugas di Kep. Nias diselenggarakan dalam tiga periode (Tabel 16.). Kegiatan workshop berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi pencapaian tujuan masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya persiapan. Sedangkan untuk pelaksanaan pelatihan pratugas terjadinya perubahan skenario dalam pelaksanaannya. Semula akan dilakukan secara paralel tetapi karena adanya kebijakan teknis maka pelaksanaan dilakukan menjadi dua gelombang.

Tabel 16. Pelaksanaan Workshop dan Pelatihan Pratugas R2PN

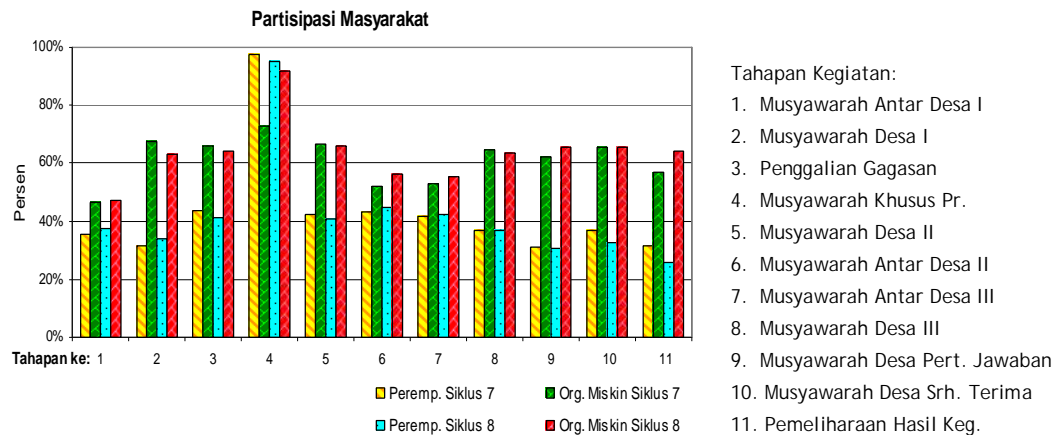
No.	Waktu	Jenis Kegiatan	Peserta	Jumlah Peserta
1.	5 -12 Januari 2007	Workshop R2PN	KM-Nasional, Desk Bencana, KM-Provinsi, KM-Kabupaten, KM-Kab. Teknik, PJOKab	23 orang
2.	14 -21 Januari 2007	Pelatihan Pratugas Gelombang I	KM-Kabupaten, KM-Kab. Teknik, P-UPK dan FMS, Ass. FMS, FK, dan PJOK	42 orang
3.	23 - 29 Januari 2007	Pelatihan Pratugas Gelombang II	KM-Kabupaten, KM-Kab. Teknik, dan FK	23 orang



III.2. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat yang dapat diukur selama ini adalah kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan terutama musyawarah desa. Namun demikian, dari banyaknya jumlah swadaya masyarakat dalam menyumbang HOK dan material pendukung kegiatan menunjukkan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Per Januari 2007, sejumlah Rp864,39 miliar dana PPK telah terserap dengan swadaya masyarakat sebesar Rp108,74 miliar atau 13% dari alokasi dana. Dari sisi tahapan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan Gambar 1.

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa rata-rata partisipasi (dalam hal ini tanpa musyawarah khusus perempuan) masyarakat untuk kelompok laki-laki sebesar 63%, perempuan 37%, dan orang miskin 60%. Tingkat partisipasi perempuan masih dinilai kurang jika dibandingkan kelompok laki-laki yang mencapai dua kali lipat jumlah perempuan yang hadir dalam musyawarah desa. Untuk mendorong partisipasi perempuan, PPK menetapkan mekanisme pembelajaran musyawarah melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).



Gambar 1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siklus VII dan VIII.

PROYEK PERCONTOHAN P2SPP

Kegiatan PPK yang partisipatif menjadi cikal bakal terwujudnya sistem pembangunan partisipatif. Untuk menindaklanjuti potensi ini, pemerintah melalui PMD merintis proyek percontohan yakni Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) yang dilaksanakan di empat kabupaten (Batanghari (Jambi), Boyolali (Jawa Tengah), Ngada (NTT), dan Minahasa Selatan (Sulawesi Utara)). Program ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui kegiatan pembangunan yang integratif dengan pembangunan reguler. Tahun ini P2SPP akan menambah empat lokasi baru yakni Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), Jombang (Jawa Timur), Tabanan (Bali), dan Tapin (Kalimantan Selatan).

Kegiatan P2SPP banyak melibatkan pelaku PPK, termasuk dari unsur konsultan walaupun dalam program ini telah disediakan setrawan sebagai fasilitator. Diharapkan TKPPK Pusat memberi penegasan mengenai tugas dan tanggung jawab setrawan agar tidak tergantung pada konsultan PPK.



REVIEW PERDA

Review Perda merupakan salah satu rangkaian kegiatan PPK III yang sangat penting. Dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah dengan Menteri Dalam Negeri, disebutkan bahwa salah satu syarat pemberian dana BLM PPK III adalah kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan review perda. Hal ini sejalan dengan kebijakan PPK III dan akan diteruskan pada PNPM-PPK dengan memberi tekanan khusus pada pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. Untuk terwujudnya model pembangunan partisipatif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya, maka dukungan peraturan daerah yang relevan sangat dibutuhkan.

Review perda dalam konteks ini mengandung dua kegiatan utama yakni meninjau peraturan daerah yang sudah ada dan mengidentifikasi kebutuhan peraturan daerah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka beberapa tahapan kegiatan perlu dilakukan yakni pembentukan tim review perda, identifikasi dan inventarisasi perda, pelaksanaan review perda, FGD dengan kelompok masyarakat, dan penyusunan rekomendasi.

Pada Januari 2007, telah diselesaikan panduan dan penjelasan/lampiran, penyusunan dan revisi SOP Review Perda serta verifikasi proposal nominasi calon lokasi review. Status terakhir panduan dan penjelasan/lampiran ini telah diajukan ke Bank Dunia untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL). Sementara SOP Review Perda masih akan di bahas dengan pihak PMD dan Bank Dunia sebelum diluncurkan ke lapangan.

Kegiatan review seharusnya telah dilakukan, namun karena secara administratif belum siap (seperti diuraikan di atas) maka kegiatan ini masih tertunda. Mengingat kegiatan ini mendapatkan dana operasional kegiatan (DOK), maka kabupaten yang berminat harus mengirimkan proposal kegiatan dan disertai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB). Respons dari pemerintahan daerah (termasuk DPRD) di beberapa lokasi cukup baik. Bahkan beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan telah mengirimkan daftar nominasi lokasi untuk kegiatan review.

Permasalahan dan Rekomendasi

Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam review perda, permasalahan utama adalah belum keluarnya NOL dari Bank Dunia tentang Panduan dan Penjelasan Review Perda. Akibatnya pelaksanaan kegiatan terhambat dan berlarut-larut. Untuk itu, jika panduan yang telah disusun dianggap kurang memadai dan perlu direvisi, diharapkan dapat diinformasikan secara resmi sehingga dapat dilakukan pembahasan dan revisi ulang.

III.3. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN LOKAL

Minimnya data dari lapangan untuk mendukung analisis kelembagaan menyebabkan, hingga saat ini, belum tersedia data yang akurat mengenai kelembagaan yang ada di masyarakat. Untuk itu dibuat panduan penataan kelembagaan (matriks, terlampir) yang telah diluncurkan ke lapangan serta mulai digunakan dan menghasilkan rencana aksi dan RKTL kelembagaan. Di samping itu, mulai disusun pula instrumen untuk memantau perkembangan kelembagaan sehingga dapat dilakukan kategorisasi. Alat ini direncanakan dapat dituntaskan pada Februari 2007. Adapun strategi penataan yang akan dilakukan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pelembagaan UPK PNPM-PPK diarahkan kepada kesepakatan kerjasama antar desa melalui BKAD, hubungan UPK dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar desa, dan penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya;



- b. UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi. Standar prosedur dikembangkan sesuai dengan fungsi yang meliputi: fungsi pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah, dsb.;
- c. Terkait dengan fungsi UPK sebagai kelembagaan pembangunan partisipatif, akan dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan di desa dan antar desa terutama yang terkait dengan tim pemeliharaan hasil kegiatan PPK yang telah berjalan;
- d. Kelompok UEP/SPP selanjutnya akan dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam. Kategorisasi ini merupakan langkah awal penguatan kapasitas kelompok.



IV. MONITORING DAN EVALUASI

Aktivitas monitoring dan evaluasi pada Januari 2007 mencakup review sistem basis data penanganan masalah, audit internal ke lapangan langsung terkait kasus penyimpangan dana oleh ketua UPK Pusaka Nagara (Subang), dan penyempurnaan maupun uploading untuk content situs PPK. Sementara itu masalah yang terselesaikan sebanyak 40 dan muncul masalah baru sejumlah 48 masalah.

Banyaknya masalah yang timbul dengan berbagai kriteria yang kompleks menyebabkan dukungan teknologi informasi menjadi penting. Dalam hal ini, dukungan yang dibutuhkan adalah sistem informasi basis data. Untuk itu, advisor KM-Nasional menyarankan untuk memperbaiki basis data yang ada agar lebih logis, dapat merekam permasalahan, dan mudah dimengerti oleh konsultan di lapangan. Di samping perangkat lunak, infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran kerja. Sebagai tindak lanjut, pada Januari 2007 KM-Nasional mengganti ISP yang dapat mengatasi masalah transmisi data yang lambat, monitoring setiap workstation sekaligus mengetahui "penyakit" sistem jaringan di kantor. Proses penyelesaian dan penyempurnaan situs PPK yang menjadi tanggung jawab unit IEC juga tak lepas dari pemantauan advisor.

IV.1. KUNJUNGAN LAPANGAN

Berdasarkan TOR, KM-Nasional berkewajiban melakukan perjalanan dinas pada separuh waktu kerjanya dalam satu bulan (30 hari). Kegiatan kunjungan lapangan pada Januari 2007 tidak banyak dilakukan karena disibukkan oleh persiapan PNPM (penyusunan PTO berikut penjelasannya dan perumusan standar kompetensi konsultan. Hanya 8 orang dari 34 orang personil yang melakukan perjalanan dinas atau 24% dari total lamanya kunjungan yang seharusnya dilakukan oleh KM-Nasional.

Selama 108 hari kerja yang dilakukan oleh 5 orang KM-Nasional dihabiskan di prov Sumatera Utara dalam rangka menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam workshop konsultan ahli dan pelatihan pra tugas untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kep. Nias. Tiga staf lainnya mengambil waktu selama 23 hari untuk melakukan audit dan investigasi terkait pengaduan masyarakat atas praktek penyimpangan dana oleh ketua UPK Pusaka Nagara (Subang). Realisasi kunjungan lapangan KM-Nasional secara rinci, ditampilkan dalam Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Kunjungan Lapangan Per Januari 2007

NO.	NAMA	LOKASI	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	Lama (hari)	Total Perjalanan	Prosentase (%)
		PROVINSI				
1	Arief Setyabudhi	Sumatera Utara	Workshop Konsultan Ahli dan Pelatihan Pra Tugas	29	29	94%
2	Hery Purnomo	Sumatera Utara	Workshop Konsultan Ahli dan Pelatihan Pra Tugas	29	29	94%



NO.	NAMA	LOKASI	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	Lama (hari)	Total Perjalan-an	Prosen-tase (%)
		PROVINSI				
3	Kartika Musdeni	Sumatera Utara	Workshop Konsultan Ahli dan Pelatihan Pra Tugas	21	21	68%
4	Nofrizal	Sumatera Utara	Workshop Konsultan Ahli dan Pelatihan Pra Tugas	21	21	68%
5	Suudi Noor	Sumatera Utara	Pelatihan Pra Tugas PPK-R2PN	8	8	26%
6	Kumoro P W	Jawa Barat	Supermon Pemeriksaan Keuangan Internal UPK, TPK, dan Kelompok	8	8	26%
7	Dodi S Sujadi	Jawa Barat	Supermon Pemeriksaan Keuangan Internal UPK, TPK, dan Kelompok	8	8	26%
8	Yayuk Wuriati	Jawa Barat	Supermon Pemeriksaan Keuangan Internal UPK, TPK, dan Kelompok	7	7	23%
	Total	Prosentase dari total KMN: $131/(36 \times 30) \times 100 = 24\%$		131	131	55%

IV.2. PEMERIKSAAN KEUANGAN INTERNAL

Memasuki tahun 2007, unit pemeriksaan keuangan internal lebih banyak melakukan kegiatan di kantor mengingat perlunya dilakukan evaluasi terhadap realisasi program kerja tahun 2006. Namun demikian, dengan adanya peningkatan kapasitas secara berjenjang dan terdesentralisasi, kegiatan audit di lapangan tetap dilakukan dengan melibatkan KM-Kabupaten. Selama periode Juli - September 2006, 24 provinsi mengirimkan hasil audit internal. Selanjutnya pada periode September 2006 - Februari 2007 baru 4 provinsi yang mengirimkan hasil audit internalnya, yaitu: Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Riau. Sejumlah 26 provinsi lainnya masih memiliki waktu satu bulan untuk mengirimkan hasil audit.

Sejatinnya, pada Januari 2007 ini unit pemeriksaan keuangan internal dapat melakukan audit di provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Riau. Akan tetapi rencana ini belum dapat dilaksanakan karena adanya beberapa indikasi terjadinya kasus penyalahgunaan dana serta laporan masyarakat sehingga perlu audit secara khusus. Salah satu lokasi audit tersebut adalah pemeriksaan UPK kec. Pusaka Nagara (kab. Subang, prov. Jawa Barat).

HASIL AUDIT

Objek kegiatan audit internal, di samping melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan PPK dan pengelolaan dana di UPK serta TPK, juga melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem pengawasan internal di setiap tingkatan konsultan. Dari kegiatan audit (difokuskan pada audit keuangan) yang dilakukan pada Januari 2007, khususnya di kab. Subang (3 kecamatan sampel audit yaitu kec. Pusakanagara, Kalijati, dan Purwadadi) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 18. Temuan Audit Langsung di Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan
1.	Keuangan UPK	Khusus di kec. Pusakanagara, setelah dilakukan audit secara intensif terhadap keuangan UPK karena adanya indikasi penyalahgunaan dana, terdapat selisih antara dana yang seharusnya ada di UPK (berdasarkan pencatatan transaksi) dengan dana yang bersifat fisik/riil yang dipegang oleh bendahara dan ada di rekening bank. Jumlah selisih dana tersebut terakumulasi mulai dari tahun 2000 sampai dengan Januari 2007 sejumlah



No	Aspek Penilaian	Temuan
		Rp442,7 juta yang disalahgunakan oleh ketua UPK kec. Pusakanagara.
2.	Pengawasan FK	Review internal terhadap pengelolaan kas dan rekening di UPK dan TPK oleh FK pun masih sangat lemah. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kepedulian FK terhadap pengelolaan dana sehingga dipercayakan begitu saja kepada UPK tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, kapasitas mereka untuk melakukan pengawasan keuangan juga masih kurang.
3.	Penanganan tunggakan	Penanganan blm optimal, sedangkan UPK sudah melakukan berbagai langkah sesuai pola penyehatan pinjaman bermasalah. Kendalanya adalah lebih disebabkan oleh karakter masyarakat.
4.	Pembinaan kelompok	Kurangnya pembinaan kelompok menyebabkan sulitnya mencari kelompok baru yang layak dan kelompok lama tidak dapat meningkatkan kapasitas pinjamannya karena terkendala masalah kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Dampaknya terdapat iddle money cukup besar di UPK (Purwadadi) karena kurangnya daya serap dari kelompok.

REKOMENDASI HASIL AUDIT

Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan, beberapa hal dapat direkomendasikan :

1. Kapasitas konsultan untuk melakukan pengawasan internal serta penguasaan terhadap instrumen-instrumen pemeriksaan keuangan harus ditingkatkan bukan hanya melalui kegiatan on the job training secara berjenjang, tetapi juga harus menjadi salah satu materi pelatihan (penyegaran/pratugas) konsultan.
2. Kegiatan pengawasan dan pelibatan masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PPK seharusnya menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja konsultan.
3. Salah satu jaminan adanya pelestarian dana bergulir PPK adalah terus berjalannya proses perguliran dana di masyarakat. Untuk itu sudah seharusnya dilakukan penguatan kelompok oleh konsultan lapangan dan UPK sehingga mereka mampu melakukan penguatan terhadap kapasitas kelompok.

IV.3. STATUS PENANGANAN MASALAH

Dalam upaya memperbaiki mekanisme penanganan masalah secara nasional, dilakukan beberapa aktivitas diantaranya: merevisi panduan MKE bagi FK, KM Kab. dan KM Provinsi, mengidentifikasi produk hukum dan model penanganan masalah, verifikasi kasus khusus, membuat dokumentasi data penanganan masalah. Di samping itu temuan BPKP terus ditindaklanjuti agar masalah yang ditemukan dapat diselesaikan.

Pada Januari 2007, dari 361 temuan BPKP TA 2005 untuk pemeriksaan tahun 2006, 180 masalah selesai, 52 masih dalam proses dan 129 masalah belum ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tahun pemeriksaan 1999 - 2005, dari 561 temuan telah selesai 319 masalah, 175 masih dalam proses, dan 67 masalah belum ditindaklanjuti. Laporan tindaklanjut temuan BPKP menggunakan format khusus dan terpisah dari laporan ini.

Berdasarkan matriks masalah, jumlah masalah secara nasional mengalami penurunan dari bulan sebelumnya 868 masalah menjadi 856 masalah. Namun dari sisi masalah yang dalam proses, bulan ini bertambah 8 masalah akibat munculnya 48 kasus baru sementara masalah yang tertangani sampai selesai sebanyak 40. Alhasil jumlah masalah dalam proses penanganan adalah 808 ditambah 8, yaitu 816 masalah. Sejumlah kasus baru tersebut terdiri dari kasus yang baru diketahui pada Januari 2007 maupun kasus lama yang sebelumnya masih merupakan indikasi dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata merupakan masalah implementasi program. Secara rinci, perkembangan dan status penanganan masalah dapat dilihat pada Tabel 19.



Tabel 19. Perkembangan Penanganan Masalah

No	Bulan	Periode	Kategori Masalah					Jumlah	%
			1	2	3	4	5		
1	Des-06	s/d Bulan Nov	114	668	2	6	25	815	93,9
2	Jan-07	s/d Bulan Des	109	667	2	4	26	808	94,4
		Baru Bulan Jan	5	35	2	3	3	48	5,6
		Total Bulan Jan	114	702	4	7	29	856	100
		Selesai	6	28	1	1	4	40	4,7
		Dalam Proses	108	674	3	6	25	816	95,3

Ket: Kategori 1 : Penyimpangan prinsip dan prosedur Kategori 4 : Force Majeur
 Kategori 2 : Penyalahgunaan dana Kategori 3: Intervensi Kategori 5 : Lain-lain

SUMBER PENGADUAN & PELAKU PELANGGARAN

Sejumlah masalah berhasil dirangkum oleh KM-Nasional dan datang dari berbagai sumber informasi/pelapor yang terdiri dari tujuh komponen. Pelapor/penemu masalah terbanyak hampir selalu ditempati oleh konsultan sebanyak 761 masalah atau mencapai 88,9%.

Tabel 20. Sumber Pengaduan/Masalah

No	Sumber Informasi	Jumlah Masalah	Prosentase
1	Konsultan	761	88,9%
2	Pengaduan Langsung Masy.	42	4,9%
3	Audit BPKP	33	3,9%
4	LSM/PBM	7	0,8%
5	Supervisi Bank Dunia	1	0,1%
6	Media Massa	1	0,1%
7	Lain-lain	11	1,3%
	Total	856	100,0%

Sisanya sebanyak 11,1% ditemukan/dilaporkan oleh 6 komponen lainnya, yaitu: (1) pengaduan langsung masyarakat mengambil porsi 4,9% yang berada di posisi kedua; (2) temuan BPKP dengan 33 masalah; (3) LSM/PBM menemukan 7 masalah; (4 dan 5) Supervisi Bank Dunia dan Media Massa masing-masing satu masalah; dan (5) Lain-lain (Banwas, Bawasda, dll.) menduduki peringkat keempat. Perincian sumber pengaduan masalah pada periode Januari 2007 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 21. Pelaku Masalah/Pelanggaran

No	Pelaku	Frekuensi Terlibat	Prosentase
1	Masyarakat/Kelompok	244	23,5%
2	UPK	231	22,2%
3	TPK	174	16,7%
4	Lain-lain	92	8,9%
5	Kades/Aparat Desa	89	8,6%
6	Konsultan	64	6,2%
7	LKMD/LPM	56	5,4%
8	PJOK dan aparat kecamatan	55	5,3%
9	Camat	23	2,2%
10	Suplier	11	1,1%
	TOTAL	1.039	100.0%

Tabel 21. menggambarkan jumlah pelaku masalah pada bulan Januari 2007. Seiring dengan berkurangnya jumlah masalah, banyaknya pelaku masalah mengalami penurunan



sebanyak 15 orang sehingga total pelaku masalah adalah 1.039 orang. Pelaku masih didominasi oleh kelompok/masyarakat dengan proporsi 23,5%. Sedangkan UPK dan TPK menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing sebanyak 231 orang (22,2%) dan 174 orang (16,7%).

MASALAH DERAJAT-4 dan MASALAH SULIT

Jumlah masalah derajat-4 (memerlukan dukungan KM-Nasional atau pusat) pada bulan Januari 2007 berjumlah 16 masalah dan 14 masalah diantaranya merupakan kategori penyimpangan dana dengan kasus terbanyak di provinsi Papua (5 masalah). Dua masalah yang dinaikkan derajatnya adalah terdapat di provinsi NAD berkaitan dengan dua orang FK/FT yang mengambil dana sebesar Rp37 juta dan kasus penyimpangan dana tanah timbun sebesar Rp57,4 juta (1.148 m² x @ Rp50.000/m²).

Sedangkan masalah yang dinilai sulit diselesaikan berdasarkan data dari provinsi berjumlah 152 masalah. Banyaknya kasus sulit akan terus berubah berdasarkan perkembangan penyelesaian yang telah dilakukan melalui supervisi dan monitoring penanganan masalah serta koordinasi dengan Korprov maupun Sp.MonEv.

MASALAH MENONJOL

Kasus Darandang (Purwakarta) telah ditangani oleh pihak pengadilan sehingga masalah menonjol berkurang satu kasus. Akan tetapi pada Januari 2007 muncul kasus baru di provinsi yang sama (Jawa Barat), yaitu kasus Pusaka Nagara dengan modus operandi yang hampir sama dengan kasus Darandang. Uraian kasus tersebut dan kasus perkembangan menonjol lainnya dirangkum pada Tabel 22.

Tabel 22. Matriks Masalah Menonjol Per Januari 2007

No.	Lokasi	Uraian Masalah
1.	Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat	Penyalahgunaan dana oleh ketua UPK yaitu Sdr. Maksum. Kejadian ini dimulai saat transisi PPK I ke PPK II dan diindikasikan melibatkan TK PPK saat itu (sdr. Nasrun). Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh P-UPK, nilai dana yang diselewengkan mencapai Rp647,385 juta. Modus operandi yaitu pemalsuan semua buku rekening UPK dan rekening koran. Specimen rekening UPK hanya satu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketua UPK dengan leluasa menyimpan dan mengambil uang. Pada 22 Jan 2007 dilakukan MAD khusus dengan hasil: 1. Menonaktifkan ketua UPK; 2. Menunjuk Pjs ketua UPK; 3. Membentuk panitia khusus (Pansus); 4. Menyusun rencana kerja Pansus; dan 5. Komitmen untuk menangani masalah ini secara serius. Pada 26 Jan 2007, konsultan bersama TK PPK dan PjOK menghadap bupati sehingga bupati bersedia membantu masalah ini dengan catatan ketua UPK sudah dilaporkan dan ditahan oleh pihak berwajib. Mengenai bantuan dana untuk menutupi kebutuhan siklus VIII dapat dilakukan tetapi mekanisme pencairannya perlu dibahas. Tanggal 27 Jan 2007, KM-Nas. dan P-UPK melakukan audit internal UPK, klarifikasi data ke Pihak BRI Unit Pusakaratu, pemeriksaan dokumen dan surat pernyataan oknum Ketua UPK, serta mendampingi Pansus untuk melaporkan masalah ini ke Pihak Berwajib. Tanggal 31 Jan 2007, tim Pansus melaporkan tindak penyalahgunaan prosedur dan penyelewengan dana UPK oleh oknum Ketua UPK kepada pihak berwajib (Polisi Sektor Pusakanagara) didampingi KM-Nas., P-UPK, dan KM Kab. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Kuitansi antara Ketua UPK dengan Sdr. Nasrun Sukatma selaku Pimpro PPK I kab. Subang, bertempat di Kantor LSM PATRA Pusakanagara.
2.	Kecamatan Teluk Mutiara, Alor, NTT	Penyimpangan dana PPK pada Rekening UEP dan SPP sebanyak Rp235 juta. BRI diminta mengembalikan dana yang seharusnya



No.	Lokasi	Uraian Masalah
		menjadi tanggungjawab BRI. Sementara itu pelaku sudah di PHK dari BRI Cabang Kalabahi. Ima Jami sudah divonis Pengadilan Kalabahi terkait dengan kasus dengan modus yang sama: penerbitan rekening fiktif perorangan, selanjutnya menyusul kasus PPK dan gizi buruk yang masih dalam proses di Polres Kalabahi. Pada 31 Januari 2007, Forum perwakilan masyarakat mendorong pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum kasus ini sehingga jelas penanganannya.
3.	Kecamatan Alor Barat Laut, Alor, NTT	Penyimpangan dana UEP/ SPP dan dana BPPK Siklus VII yang melibatkan oknum dari BRI Unit Moru, sebesar Rp615 juta. Per 23 Juni 2006, BRI telah mengembalikan dana sebesar Rp320 juta dan tak bersedia untuk bertanggung jawab atas Rp295 juta lainnya, karena menilai bukan kesalahan BRI melainkan staf-nya. Perkembangan penyelesaian kasus ini sama dengan kasus di kec. Teluk Mutiara, NTT.
4.	Distrik Warmare, Manokwari, IJB	Penyimpangan dana PPK Rp100,4 juta oleh mantan FD Warmare dan kepala Cabang BRI Wosi, Kab. Manokwari. Para pelaku berjanji mengembalikan dalam waktu dekat dan bersedia diproses secara hukum. Tanggal 28 September telah digelar MAD khusus yang ke-3 dengan hasil bahwa pertanggungjawaban administrasi keuangan untuk 8 desa telah dilakukan dan diterima oleh forum (Bendahara UPK telah mempertanggungjawabkan seluruh keuangan termasuk sejumlah uang dari pos 3% yang diselewengkannya). Pada 25 Jan 2007, FK, PjOK dan TPK mengadakan pertemuan yang hasilnya PjOK akan menyurati supplier untuk memperbaiki PLTA di tiga desa sampai dengan 10 Februari 2007.
5.	3 desa di Kec. Muara Dua Kisam, Oku Selatan, Sumsel	Penyimpangan prinsip dan prosedur serta penyimpangan dana dalam pembuatan PLTA. Kasus yang terjadi adalah adanya perubahan desain dari kincir air ke turbin serta pekerjaan tidak sesuai dengan desain dan RAB. Disamping penyimpangan dana oleh supplier, MAD khusus telah dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak supplier, dengan hasil: Memberikan batas waktu sampai dgn tgl 12 September 2006 kpd CV. Bakis Jaya untuk menyelesaikan pembangunan PLTA, bila sampai dengan batas waktu yg telah ditetapkan tidak juga selesai, maka CV. Bakis Jaya harus mengembalikan seluruh dana kepada masyarakat di 3 desa dan selanjutnya masalah akan diselesaikan melalui proses hukum. Pada 25 Jan 2007, FK, PjOK dan TPK mengadakan pertemuan yang hasilnya PjOK akan menyurati supplier untuk memperbaiki PLTA di tiga desa sampai dengan 10 Feb 2007.
6.	Kec. Takkala, kab. Wajo, Sulsel.	Pada UPK kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan selisih di neraca sebesar Rp. 502.635.705,-. Yang telah diselewengkan oleh pengurus UPK. Rapat khusus di kantor camat Takkalalla, melibatkan kadis PMD dan anggota TK-PPK lainnya telah digelar dan hasilnya dilanjutkan melalui jalur hukum. Pada 29 Des 2006 telah dilakukan pertemuan di kantor BPMD yang dihadiri oleh kepala BPMD, TK PPK Kab., Polres, camat, pelaku (kecuali mantan sekr. UPK), FK, KM, dan Sp. Monev dengan hasil: pelaku akan mengembalikan minimal 40% dari total uang yang telah diselewengkan (kira-kira Rp70 juta/pelaku) paling lambat 24 Jan 2007 dan jika tidak ada realisasinya maka pelaku akan kembali dimasukkan dalam tahanan Polres Wajo. Dalam pertemuan antara Korprov dan Bupati Wajo pada 24 Jan 2007, Bupati menjamin untuk menyelesaikan kasus tersebut dan akan dikoordinasikan dengan Kapolres.
7.	Kec. Pulau Hanaut, kab. Kotim, Kaltim	Akibat Ketua UPK tercebur ke Sungai dana SPP dan UEP senilai Rp64,5 juta serta DOK senilai Rp2 juta ikut hanyut. MAD khusus telah dilakukan, hasilnya ketua UPK bersedia diproses secara hukum. Pada 18 Jan 2007 dilaksanakan MAD khusus penanganan masalah dengan hasil pelaku bersedia menyerahkan rumah dan tanah miliknya yang bernilai Rp8 juta dan selanjutnya sisa dana yang hilang akan dibayar dengan cara diangsur Rp2.437.500,- selama 24 bulan.



PENANGANAN MASALAH PENYALAHGUNAAN DANA

Masalah penyalahgunaan dana masih mengalami kenaikan dan menduduki urutan tertinggi dibandingkan dengan masalah lainnya. Melihat fenomena ini, unit penanganan masalah bekerja sama dengan unit terkait, diantaranya unit pemeriksaan keuangan internal, kredit mikro, training, dan pemantauan independen untuk memperketat pengendalian lapangan dalam rangka upaya mengantisipasi kemungkinan bertambahnya masalah baru.

Pada Januari 2007 tercatat 702 masalah penyalahgunaan dana dan 28 diantaranya dinyatakan selesai. Dari 702 masalah penyalahgunaan dana tersebut, total dana PPK yang disewelengkan mencapai Rp20,037 miliar dengan nilai pengembalian sebesar Rp4,351 miliar. Artinya rasio pengembalian sebesar 22%. Nilai ini relatif kecil, namun tidak dapat dipandang kecil karena penanganan masalah pada level masyarakat cukup unik dan beragam. Disamping itu, alternatif penyelesaian masalah ini tidak hanya berupa pengembalian uang tetapi juga berupa kompensasi aset/materi atau sanksi pidana melalui proses hukum atau sanksi sosial berdasarkan hukum adat setempat, bahkan kembali ke kas negara sebagai konsekuensi UU Tindak Pidana Korupsi.

PENANGANAN MASALAH MELALUI PROSES HUKUM FORMAL

Pada bulan Januari 2007 masalah yang ditangani melalui jalur hukum formal mengalami kenaikan 8 kasus yaitu menjadi 159 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa kasus tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penanganan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga akhirnya dilanjutkan pada proses litigasi. Jumlah kasus dalam proses di kepolisian pada bulan ini 94 kasus, dalam proses di Kejaksaan sebanyak 61 kasus, pengadilan 3 kasus, dan 1 kasus dengan putusan tetap pengadilan di provinsi Lampung.

KECAMATAN BERMASALAH

Banyaknya kecamatan bermasalah berkurang satu menjadi 69 kecamatan, karena satu kecamatan di provinsi NTT (kec. Satarmese) kasusnya telah selesai sehingga dikeluarkan dari daftar rekomendasi kecamatan bermasalah. Sebagaimana masalah penyimpangan dana, kecamatan bermasalah merupakan masalah reguler yang terus menjadi fokus pemantauan dan penanganan oleh para pelaku PPK secara berjenjang. Namun demikian terdapat pula banyak masalah kecamatan bermasalah mengalami stagnasi penanganan disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang terjadi diluar kemampuan masyarakat dan pelaku PPK (tergolong dalam kategori kasus yang sulit diselesaikan). Di sisi lain, sebagian masalah belum ada dukungan penanganan yang maksimal oleh TK-PPK dan masyarakat terutama di lokasi phase out.

Berkenaan dengan hal tersebut, KM-Nasional telah menetapkan kasus-kasus prioritas yang masih bisa didorong penanganannya untuk menjadi fokus perhatian bersama secara berjenjang yang akan dievaluasi setiap bulan. Sedangkan terhadap masalah kecamatan bermasalah yang sulit/tidak mungkin lagi diselesaikan oleh pelaku PPK, dilakukan verifikasi dan selanjutnya diambil langkah penanganan yang lebih tepat.

IV.4. PEMANTAUAN INDEPENDEN

Program PPK yang memposisikan diri sebagai program pemberdayaan masyarakat harus menerapkan konsep ini dalam seluruh aktivitas pelaksanaan program, termasuk aktivitas pemantauan. Agar masyarakat mampu melakukan pemantauan, dibutuhkan



pendampingan yang intensif. PPK bekerja sama dengan NGO (Non Government Organization) di seluruh provinsi untuk membentuk dan mendampingi masyarakat pemantau atau dikenal dengan nama LSM-PBM.

Pada Januari 2007, KM-Nasional melakukan evaluasi terhadap kinerja LSM yang ditinjau dari 5 aspek, yakni: perkembangan kegiatan, teknik dan metodologi, hasil pendampingan, penyajian informasi, dan pelaporan.

PERKEMBANGAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, LSM memiliki target-target tahapan kegiatan yang harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan perkembangan kegiatan yang telah dicapai, LSM dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Adapun jenis kelompok dan LSM-LSM yang termasuk dalam masing-masing kelompok diuraikan Tabel 23.

Tabel 23. Evaluasi LSM-PBM Berdasarkan Perkembangan Kegiatan

No.	Perkembangan Kegiatan	LSM-PBM	Keterangan
1.	Cepat	NAD, Sumut, Jatim, Sulut, Sultra, dan NTT	Pada bulan kedua, tim masyarakat pemantau sudah terbentuk dan ada laporan temuan atas nama kelompok
2.	Sedang	Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTT, Sulsel, dan Maluku	Pada bulan kedua-ketiga aktivitas utama masih pada tahapan sosialisasi, identifikasi, dan penyadaran kritis. Rata-rata tim masyarakat pemantau terbentuk pada bulan ketiga.
3.	Lambat	Jambi, Kalsel, dan Papua	Di Jambi sebagian besar tim pemantau belum terbentuk. Sedangkan di Kalsel, kegiatan yang dilaporkan tidak menunjukkan aktivitas berarti bagi penguatan kelompok masyarakat. Di Papua lebih disebabkan faktor eksternal (geografis dan karakteristik masyarakat).

TEKNIK DAN METODOLOGI

Pemetaan berdasarkan Teknik dan Metodologi yang digunakan tetap menunjukkan bahwa sebagai besar LSM memahami metode partisipatif adalah metode pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat (diwakili oleh tim MP). Sedangkan prinsip-prinsip PRA dan metodologi lain yang harus digunakan LSM dalam kegiatan ini, belum terpenuhi.

On the Job Training (OJT) teknik pemantauan yang diberikan fasilitator kepada tim MP (tim Masyarakat Pemantau) hanya teknik-teknik umum yang sering mereka sebut dengan metode wawancara, observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Metode tersebut diyakini tidak didasarkan pada landasan teori yang jelas dan sama sekali tidak menyetuh pada landasan teori dari teknik-teknik PRA.

HASIL PENDAMPINGAN

Output kegiatan LSM-PBM yang terutama adalah terbentuknya masyarakat pemantau. Selama 8 bulan pendampingan di tahun 2006, tim pemantau masyarakat yang terbentuk dibimbing oleh fasilitator LSM. Diharapkan tim ini akan tetap eksis walaupun sudah tidak didampingi lagi.



PENYAJIAN INFORMASI

Setiap bulan LSM-PBM harus memberikan laporan kegiatannya. Berdasarkan evaluasi laporan LSM per Oktober 2006, diperoleh kategori pada tabel berikut:

Tabel 24. Evaluasi LSM-PBM Berdasarkan Penyajian Informasi

No.	Kualitas Penyajian	LSM-PBM	Keterangan
1.	Baik	Sumatera Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, dan Maluku	Informasi yang disajikan dalam laporan mudah dipahami. Kegiatan yang dilaporkan bisa dipahami sebagai kegiatan yang signifikan untuk mencapai target.
2.	Cukup	NAD, Bali, Sulsel, Sultra, dan Papua	Informasi yang disajikan dalam laporan cukup dapat dimengerti. Informasi kegiatan yang dilaporkan bisa dipahami sebagai kegiatan yang cukup signifikan untuk mencapai target.
3.	Buruk	Sumut, Sumsel, Jambi, NTB, NTT, Kalsel, dan Sulut	Informasi yang disajikan dalam laporan sulit untuk dimengerti. Informasi kegiatan yang dimuat dalam laporan tidak penting untuk dilaporkan karena tidak berkaitan langsung dengan upaya mencapai target kegiatan.

PELAPORAN

Harus diakui bahwa sampai dengan akhir Desember 2006, belum ada satupun masalah yang diungkap dari hasil kegiatan pemantauan Tim MP masuk dalam laporan masalah di jalur konsultan. Namun demikian, bukan berarti laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh konsultan. Kebanyakan masalah-masalah yang ditemukan langsung dilaporkan, ditindaklanjuti, dan diselesaikan oleh konsultan. Akibatnya masalah tidak dicatat/didokumentasikan karena dianggap telah tertangani dan/atau dianggap selesai.

Untuk mengantisipasi hal di atas, KM-Nasional (Unit Pemantauan Independen) akan berkoordinasi dengan unit Penanganan dan Pengaduan untuk membuat mekanisme pelaporan yang efektif agar masalah-masalah yang diungkap oleh tim MP dapat terdokumentasi dengan baik di jalur konsultan, khususnya di tingkat provinsi.

IV.5. INFORMASI, EDUKASI, DAN KOMUNIKASI (IEC)

Pembuatan buletin PPK edisi Januari 2007, pengembangan dan perbaikan content situs PPK yang baru, dan persiapan launching PNPM-PPK, serta kegiatan rutin lainnya seperti pembuatan artikel untuk situs PPK yang ada merupakan agenda-agenda yang berhasil dilakukan pada Januari 2007. Langkah-langkah strategis yang telah disusun pada bulan sebelumnya terus ditindaklanjuti.

PENGEMBANGAN PROGRAM IEC PPK

Dalam rangka sosialisasi upaya rehabilitasi dan revitalisasi Papan Informasi PPK sebagai media transparansi dan akuntabilitas, masalah ini dijadikan topik utama Buletin PPK Januari 2007. Di samping itu, persiapan PNPM masih menjadi bagian agenda IEC terutama dalam mempersiapkan peluncuran PNPM yang rencananya akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada awal Maret 2007 mendatang.

Langkah persiapan yang dilakukan adalah dengan membuat paket informasi PPK serta memasukkan sejumlah materi IEC dalam draft penjelasan I PTO PNPM-PPK tentang



Sosialisasi. Untuk lebih mengoptimalkan situs PPK, ditempatkan link situs lembaga yang memiliki kerjasama dengan PPK pada halaman depan situs.

Kendala dan Rekomendasi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan selama bulan Januari adalah:

- a. Walaupun sudah ada perbaikan jaringan internet, sarana pendukung masih belum memadai (terutama dalam hal perangkat komputer) sehingga memperlambat pengolahan informasi dari daerah ke pusat maupun sebaliknya;
- b. Tim IEC telah menyiapkan rencana kegiatan selama setahun, namun belum ada persetujuan formal sehingga cukup menghambat pelaksanaannya;
- c. Situs internet sudah dapat diakses secara luas namun masih perlu beberapa perbaikan terutama tampilan dan isi data yang ada.

Unit IEC telah mencoba untuk mensiasati secara proaktif kendala yang ada, namun belum sepenuhnya tercapai. Sebagai upaya untuk menangani kendala yang ada dan pemenuhan rencana yang telah disiapkan, maka direkomendasikan: (a) perlu adanya peremajaan perangkat komputer yang dapat diandalkan untuk mendukung operasional IEC; (b) dukungan resmi atas rencana yang disusun untuk tahun 2007 sangat diharapkan. Untuk itu unit IEC akan secara proaktif mendorong hal tersebut; (c) adanya dukungan dari konsultan baik dari tingkat nasional maupun provinsi untuk memantau pemanfaatan dan pengelolaan papan informasi PPK sebagai media transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan pemantauan tersebut dapat dilakukan saat kunjungan lapangan; dan (d) perlunya dukungan dari unit lain dalam menyediakan dan mengisi informasi yang ditampilkan pada situs internet PPK.



V. PENGELOLAAN KONSULTAN

Kegiatan Unit HRD di bulan Januari 2007 tidak lepas dari persiapan PNPM. Proses rekrutmen menjadi fokus utama kegiatan, diantaranya menyusun panduan seleksi dan pemetaan konsultan yang telah ada. Dari kuota 3.042 orang konsultan, jumlah konsultan yang aktif 2.938 orang dan kekosongan sebanyak 104 orang.

Pembuatan panduan seleksi penerimaan, mapping, rekrutmen konsultan dan fasilitator PNPM-PPK, rekap evaluasi kinerja KM-Provinsi Triwulan IV Tahun 2006, identifikasi dan analisa penanganan masalah yang terindikasi kode etik, dan aktivitas rutin lainnya merupakan bagian dari kegiatan unit HRD di bulan Januari 2007. Dari aktivitas tersebut dapat disarikan laporan perkembangan jumlah, cadangan, kekosongan, dan penempatan konsultan.

V.1. PERKEMBANGAN JUMLAH KONSULTAN

Seperti telah dijelaskan pada bulan lalu, kuota konsultan mengalami penurunan akibat lokasi phase out (Siklus VIII). Hingga Februari 2007, lokasi phase out terus bertambah hingga 566 lokasi sejalan dengan tuntasnya MDST di lokasi tersebut. Di samping itu, berkaitan dengan berakhirnya Pilot Pendidikan, posisi FK-Pn pun berakhir kontraknya pada 31 Desember 2006.

Jumlah konsultan saat ini 2.938 orang dari 3.042 orang kuota sehingga terdapat kekosongan sebanyak 104 orang dengan rincian komposisi berikut jumlahnya sebagai berikut:

a.	Konsultan Manajemen Nasional (Jakarta)	:	36	orang
b.	Konsultan Manajemen Provinsi	:	120	orang
c.	Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab.)	:	188	orang
d.	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)	:	181	orang
e.	Pendamping UPK (Kabupaten)	:	78	orang
f.	Fasilitator Kecamatan (FK)	:	1.119	orang
g.	Fasilitator Teknik (FT)	:	1.174	orang
h.	Fasilitator Kecamatan Informasi (FKI) khusus NAD dan Nias	:	42	orang
i.	Fasilitator Kecamatan Pendidikan (FK-Pn)	:	-	orang

V.2. CADANGAN DAN KEKOSONGAN KONSULTAN

Konsultan cadangan sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan secara cepat. Namun cadangan jarang sekali mau ditempatkan di provinsi lain. cadangan yang ada saat ini diprediksikan akan ditempatkan di lokasi PNPM-PPK tahun 2007. Cadangan ini merupakan hasil seleksi aktif di setiap provinsi dan konsultan demobilisasi. Setiap posisi, jumlah cadangan konsultan lapang di setiap provinsi sampai dengan 1 Februari 2007 adalah sebagai berikut:



Tabel 25. Komposisi Konsultan Cadangan per Provinsi

No.	Provinsi	KM-Kab.	KMT	Pend. UPK	FK	FT	FKI	FKPn
1	Nanggroe Aceh Darussalam	13	11	3	25	0	1	0
2	Sumatra Utara	1	1	2	7	3	3	0
3	Sumatra Barat	1	0	0	5	5	0	0
4	Riau	5	1	0	2	0	0	0
5	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0
6	Jambi	0	0	0	6	7	0	0
7	Sumatera Selatan	3	2	0	31	16	0	0
8	Lampung	0	0	0	18	0	0	0
9	Banten	0	0	0	6	0	0	0
10	Jawa Barat	2	4	0	36	16	0	0
11	Jawa Tengah	11	11	0	92	91	0	0
12	DI. Yogyakarta	0	0	0	0	12	0	0
13	Jawa Timur	6	7	2	72	60	0	0
14	Bali	0	0	0	15	21	0	0
15	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	5	1	0	0
16	Nusa Tenggara Timur	0	0	2	21	0	0	0
17	Kalimantan Barat	0	1	0	4	1	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	1	0	18	10	0	0
19	Kalimantan Timur	0	1	0	6	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	1	2	0	26	15	0	8
21	Sulawesi Barat	0	0	0	7	8	0	5
22	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	0	0
23	Sulawesi Utara	1	0	0	10	0	0	0
24	Sulawesi Tenggara	0	1	0	10	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	7	5	0	5
26	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0
27	Maluku Utara	0	0	0	23	0	0	0
28	Maluku	0	0	0	2	2	0	0
29	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	0	0	0
30	Papua	0	0	0	3	3	0	0
	Jumlah	44	43	9	457	277	4	18

Selain perkembangan cadangan konsultan, kekosongan konsultan pada beberapa posisi baik tingkat pusat maupun daerah harus menjadi perhatian. Terdapat kekosongan KM-Nasional sebanyak lima posisi yaitu: Spesialis Partisipasi Perempuan, Spesialis Kesehatan Masyarakat, Spesialis Penanganan Masalah, Ahli Konstruksi, dan Ahli Manajemen Keuangan Negara. Sedangkan posisi kosong untuk KM-Provinsi sebanyak 11 posisi, yaitu: Spesialis Training Regional (NAD), Spesialis Monev (Riau), Spesialis MIS (Riau, Maluku Utara, NTT, dan Papua), Pembimbing Teknik Region (Papua dan Irijabar 4 orang), dan McFS (Papua-Irijabar).

Sementara itu, kekosongan konsultan lapangan sebanyak 88 orang yang tersebar di 13 provinsi. Sisanya (17 provinsi) tidak terdapat kekosongan. Hingga Februari 2007, provinsi yang terbanyak mengalami kekosongan adalah Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 34 posisi (Tabel 26.), diikuti oleh Sumatera Utara sebanyak 16 orang. Dengan dilaksanakannya PPK Pola Khusus sejak tahun 2005 di kedua provinsi tersebut, kuota konsultan yang tersedia cukup banyak dan terisi hampir lengkap. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa konsultan terutama fasilitator banyak yang mengundurkan diri maupun terkena kasus pelanggaran kode etik.



Tabel 26. Posisi Kosong Konsultan Lapangan per Januari 2007

No.	Provinsi	KM-Kab.	KMT	Pend. UPK	FK	FT	FKI	Jumlah
1	NAD	1	0	0	2	24	7	34
2	Sumatra Utara	1	0	0	6	9	0	16
3	Riau	0	0	0	1	5	0	6
4	Jawa Barat	1	2	0	5	0	0	8
5	Jawa Timur	0	0	0	0	1	0	1
6	NTT	0	0	0	1	2	0	3
7	Kalimantan Barat	0	0	0	0	1	0	1
8	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	3	0	3
9	Sulawesi Utara	1	1	0	1	0	0	3
10	Sulawesi Tenggara	0	1	0	0	0	0	1
11	Gorontalo	0	1	1	0	7	0	9
12	Maluku Utara	0	1	0	0	1	0	2
13	Irian Jaya Barat	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah		4	6	1	16	54	7	88

Kekosongan konsultan diatas, telah diupayakan pengisiannya melalui koordinasi dengan Korprov untuk:

- segera mengajukan pengisian kosongan dari cadangan yang ada;
- menawarkan kepada provinsi lain melalui nota dinas kekosongan yang ditembuskan kepada setiap KM-Provinsi;
- melakukan rekrutmen jika dari cadangan tidak terpenuhi;
- membuat post review hasil seleksi aktif calon konsultan lapang;
- melakukan promosi dari FK/FT untuk menjadi KM-Kab/KMT;

Untuk kekosongan KM-Nasional dan KM-Provinsi, dilakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan usulan pengisian konsultan dengan Perusahaan Jasa Konsultan maupun Sekretariat PPK Pusat. Adapun kekosongan ini disebabkan terjadinya PHK (indisipliner atau kode etik) atau pengunduran diri. Jumlah konsultan yang keluar pada bulan Januari 2007 ditampilkan Tabel 27.

Tabel 27. Penyebab Kekosongan Konsultan per Januari 2007

No	Uraian	KM-Nas	KM-Prov	KM-Kab	KMT	P-UPK	FK	FT	FKI	Jumlah
1	PHK Indisipliner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PHK Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mengundurkan Diri	0	0	1	0	0	1	0	0	2
4	Demob/Tidak diperpanjang	0	0	3	3	0	186	184	0	376
Jumlah		0	0	4	3	0	187	184	0	378

Catatan: Data diatas berdasarkan laporan provinsi dan telah disahkan oleh Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.



Pada bulan ini sebanyak 376 orang konsultan lapang tidak diperpanjang kontraknya, karena lokasi PPK III-A (Siklus VIII) mengalami phase out. Akibatnya quota konsultan lapangan berkurang.

Pengisian Kekosongan Konsultan

Selama Januari 2007, telah terisi 16 orang dari kekosongan 93 orang. Kekosongan konsultan secara kumulatif per 1 Februari 2007 mencapai 104 orang. Artinya terjadi penambahan posisi kosong untuk 27 orang. Dibandingkan dengan bulan Desember 2006, banyaknya kekosongan mengalami peningkatan sebanyak 11 posisi sedangkan pengisian mengalami penurunan dari 44 posisi menjadi sebesar 16 posisi pada bulan Januari 2007 (Tabel 28.).

Tabel 28. Pengisian Posisi Kosong Konsultan per Januari 2007

No	Posisi	kuota	Kosong awal Jan	Pengisian selama Jan	Kosong awal Feb	Total Terisi
1	Konsultan Manajemen Nasional	41	3	0	5	36
2	Konsultan Manajemen Provinsi	131	11	0	11	120
3	Konsultan Manajemen Kabupaten	192	4	1	4	188
4	Konsultan Manajemen Teknik	187	8	3	6	181
5	Pendamping UPK	79	0	0	1	78
6	Fasilitator Kecamatan	1.135	11	3	16	1.119
7	Fasilitator Teknik	1.228	51	9	54	1.174
8	Fasilitator Kecamatan Informasi	49	5	0	7	42
Jumlah		3.042	93	16	104	2.938

V.3. PERKEMBANGAN PENEMPATAN KONSULTAN

Pengusulan pengisian kekosongan konsultan di beberapa provinsi telah dilakukan melalui Perusahaan Jasa Konsultan masing-masing, dimana KM-Nasional memastikan kelayakan calon konsultan yang akan ditempatkan/ditugaskan dengan menelaah data calon (membuat post review) apakah calon bersangkutan memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan program. Hasil telaahan (post review) ini menjadi rekomendasi KM-Nasional kepada Satker Pusat.

V.4. MASALAH DAN REKOMENDASI

Dalam pengelolaan konsultan ditemui beberapa permasalahan diantaranya:

- Hingga saat ini belum terlihat aksi tindak dalam mengatasi kekosongan fasilitator terutama FT di NAD dan Sumatera Utara (Kep. Nias);
- Masih kurang akuratnya data yang dikirim provinsi, menyebabkan proses rekapitulasi tingkat nasional terhambat;
- Dalam mengirimkan data seperti mapping konsultan & fasilitator PNPM-PPK serta short list konsultan/fasilitator, provinsi tidak memberikan tembusan kepada KM-Nasional tetapi hanya mengirimkan kepada Satker saja.

Melihat permasalahan di atas, maka direkomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan KM-Provinsi terkait (NAD dan Sumatera Utara) maupun provinsi lain agar rekrutmen dapat segera dilakukan. Untuk menjaga keakuratan data, diharapkan dilakukan validasi data terlebih dahulu sebelum dikirimkan. KM-Nasional akan memberikan umpan balik kepada provinsi mengenai keakuratan data yang diperoleh dari provinsi. Di samping itu, perlu diingatkan agar seluruh Korprov tetap melakukan jalur fungsional.

